

SKRIPSI

PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

Oleh:

**OKTA SEPTIANA WATI
NPM. 1502100289**



**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM
(Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
OKTA SEPTIANA WATI
NPM.1502100289

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M.A
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN
UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC.
BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)**

Nama : Okta Septiana Wati

NPM : 1502100289

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Mei 2019
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Okta Septiana Wati
NPM : 1502100289
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : **PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN
UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC.
BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Mei 2019
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 1583 /In. 28. 3 / D / PP. 00.9 / 06 / 2019

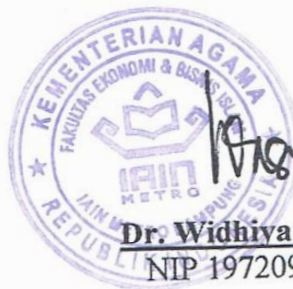
Skripsi dengan judul: PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah), disusun oleh: Okta Septiana Wati NPM 1502100289, Jurusan: S1-Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 28 Mei 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekertaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

**Oleh:
Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289**

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain :

1. Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini
2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja
4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Disisi lain, UMKM menghadapi permasalahan yaitu terkait terbatasnya modal kerja. Dari masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana Peranan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya dengan tujuan untuk mengetahui Peranan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: “Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada BPD Lampung KC Bandar Jaya, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan, baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pinjaman yang diberikan oleh bank memiliki peranan sebagai alternatif sumber pendanaan eksternal dengan bunga rendah, dengan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat KUR, meningkatkan taraf hidup para wirausahawan atau pengusaha UMKM, dan membantu pengusaha kecil menengah untuk fokus pada kinerja produktivita

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Septiana Wati
NPM : 1502100289
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019

Yang Menyatakan,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah:2)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Nyoman Rawi dan Bapak Sutrisno yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang.
2. Kakakku Radius Uly Artha dan adikku Munawaroh Hidayah yang selalu mendukungu dan memberi motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan (para pejuang skripsi) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan S1-Perbankan Syariah guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Reonika Puspita Sari M.E.Sy selaku ketua jurusan S1-Perbankan Syariah.
5. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Seluruh dosen dan staff yang telah memeberikan bimbingan kepada peneliti.

7. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2015 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, Mei 2019
Peneliti,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kredit Usaha Rakyat	
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	10
2. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat	12
3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat	13
4. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	14
5. Persyaratan Untuk Mengajukan Kredit Usaha Rakyat.....	19
B. Pemberdayaan UMKM	
1. Pengertian Pemberdayaan UMKM	20
2. Prinsip Pemberdayaan UMKM	27
3. Dampak Program Pemberdayaan UMKM	27
4. Faktor Kendala dan Potensi Efektifitas Program Pemberdayaan	29
C. Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya	
1. Sejarah Berdirinya BPD Lampung KC Bandar Jaya.....	39
2. Visi dan Misi BPD Lampung KC Bandar Jaya	42

3.	Struktur Organisasi Devisi Kredit BPD Lampung KC Bandar Jaya.....	43
4.	Produk-Produk UMKM BPD Lampung KC Bandar Jaya...	45
B.	Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah	49

BAB V PENUTUP

A	Kesimpulan.....	64
B	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	25
4.1	Keterangan Nasabah KUR BPD Lampung KC Bandar jaya.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Divisi Kredit PT BPD Lampung KC Bandar Jaya .. 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain :

1. Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini
2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja
4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Pada saat ini pemberdayaan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja

bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki.¹

Untuk memajukan UMKM, Bank Indonesia (BI) sebenarnya telah melakukan beberapa langkah penting, seperti mendorong pembentukan Unit Layanan UMKM dibank-bank. Melalui lembaga ini, diharapkan agar pelaku usaha mikro bisa mengakses layanan perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat bersamaan, perbankan juga bisa menjaring kerjasama yang saling menguntungkan dengan UMKM.²

Disisi lain, UMKM menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.³

¹ Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM”, Jurnal ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, 105-106.

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-3 (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

³ Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean”, dalam *www.kemenkeu.go.id* diunduh pada 9 Januari 2019.

Dari masalah-masalah yang hadapi oleh para pelaku UMKM tersebut, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara sederhana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipahami sebagai sebuah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang layak (*feasible*) tapi belum *bankable* atau belum pernah berhutang ke bank manapun.⁴

Strategi untuk memberdayakan pelaku usaha skala mikro dan kecil antara lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas usahanya. Namun demikian strategi pemberdayaan pengusaha mikro pada umumnya seringkali tidak berhasil antara lain disebabkan karena:

1. Kurang kesadaran dan motivasi dari pengusaha sendiri untuk mengembangkan usaha lebih profesional. Mereka sudah merasa cukup jika produknya terjual.
2. Kurang inovasi dalam manajemen usaha baik di bidang pemasaran, produksi maupun strategi penjualan.
3. Terbatasnya waktu untuk terjun secara total dalam usaha karena terbentur aktivitas domestik maupun sosial (pengajian, arisan, pertemuan warga, dll) terutama bagi pengusaha perempuan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk kegiatan pelatihan usaha, dll
4. Akses kepada pendanaan dan permodalan rendah.

Selain permasalahan tersebut, belum adanya pembinaan yang terintegrasi baik dari sisi permodalan, manajerial, maupun pengembangan

⁴ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Depkominfo, 2008), 5-6.

sumberdaya manusia, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih terintegrasi agar kemajuan usaha dapat bertahan lama tanpa mengurangi kemandirian usaha.⁵

Bandar Jaya sebagai salah satu kawasan dengan lalu lintas perekonomian yang begitu banyak jelas memiliki potensi yang besar bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). BPD Lampung KC Bandar Jaya merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Lampung yang terletak di Jl. Proklamator No. 134 Bandar Jaya, Lampung Tengah. Tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu menodorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam upaya pemberdayaan UMKM, di BPD Lampung menyediakan jasa Kredit Usaha Rakyat dengan ketentuan suku bunga 7% pertahun atau 0,58 % perbulan, yang terdiri dari KUR Mikro dengan plafon 1 juta hingga Rp 25 juta dengan jangka waktu KUR mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja, paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, KUR Kecil dengan plafon dari 25,1 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu KUR kecil paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Divisi yang khusus menangani Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah divisi kredit.

Berdasarkan hasil *survey* yang peneliti lakukan di BPD Lampung KC Bandar Jaya, nasabah UMKM kurang proaktif dan belum memaksimalkan bantuan yang diberikan, kemandirian UMKM yang diharapkan belum

⁵ Ida Susi Dewanti, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro: Kendala Dan Alternatif Solusinya," Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 6. No. 2 Januari 2010, 1.

sepenuhnya berhasil. Sebagai lembaga keuangan juga, disini Bank Lampung harus bersaing dengan Bank Umum Milik Negara lainnya untuk pemberdayaan UMKM, masyarakatpun kurang mengetahui tentang produk pemberdayaan UMKM yang ada di Bank Lampung, karena pemberdayaan UMKM lebih dikenal merupakan produk dari BRI. Dana yang sudah dikeluarkan oleh bank pada tahun 2018 untuk Kredit Usaha Rakyat sejumlah 5,083 Milyar (lima milyar delapan puluh tiga juta) dan disalurkan kepada 64 debitur. Dimana dana untuk KUR Kecil 1,1 Milyar disalurkan kepada 3 debitur, dan untuk KUR Mikro sebesar 3,093 Milyar (tiga milyar sembilan puluh tiga juta) disalurkan kepada 61 debitur.⁶

Menurut beberapa nasabah yang peneliti wawancarai, kredit yang diberikan oleh bank membantu mereka dalam masalah permodalan usaha, namun usaha yang dijalankan nasabah tidak terlihat berkembang. Hal itu karena beberapa faktor, yaitu seperti gaya hidup masyarakat Bandar Jaya yang terkenal konsumtif, sehingga berdampak pada usahanya yang mengakibatkan pembayaran kredit nasabah sering terlambat. Menurut ibu Tuti Ningsih, dan bapak Samim pinjaman tersebut tidak berpengaruh terhadap pengembangan usaha yang dimilikinya, karena tidak semua uang yang diberikan oleh bank untuk kegiatan usaha, melainkan 10-20% digunakan untuk keperluan konsumtif. Sedangkan menurut bapak Mustafa, setelah mendapatkan tambahan modal dari Bank Lampung usahanya semakin berkembang, karena bunganya dirasa ringan. Dengan adanya produk Kredit Usaha Rakyat tersebut disini ada beberapa nasabah yang

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Budi Mulyawan selaku *SPV Bisnis* dan Ibu Yasmin selaku *AO(Account Officer)* Pada 27 Desember 2018.

sukses setelah mendapat bantuan modal usaha yaitu salah satunya adalah bapak Suherman yang meminjam kredit KUR sebesar 500 juta, awalnya dana tersebut digunakan untuk modal usaha toko bangunan dan saat ini usaha menjadi cukup besar.⁷

Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa, peranan Bank Lampung sebagai lembaga keuangan tentu sangat diperlukan. Tak hanya sebagai penyedia modal, namun perlu adanya pemberdayaan guna pengembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah agar nantinya usaha yang dijalankan nasabah dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya suatu resiko. Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan lembaga keuangan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan judul: **“Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM di Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya?

⁷ Wawancara dengan nasabah kredit UMKM Pada tanggal 27 Desember 2018 dan 1 Januari 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan lembaga keuangan khususnya mengenai peranan KUR terhadap upaya pemberdayaan UMKM

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai pemberdayaan UMKM.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian dilakukan oleh Adrey Julianus Pinem tahun 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul *“Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan”*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kredit usaha rakyat dalam

mengembangkan usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil, hal ini dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyarakat.⁸

2. Penelitian dilakukan oleh V. Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani Utami tahun 2015, Universitas Respati Yogyakarta, dengan judul “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian ini mengkaji tentang seberapa jauh peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkatkan kinerja dalam usaha kecil menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat berperan dalam meningkatkan kinerja dalam usaha kecil menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dari hasil penelitian bahwa

⁸ Adrey Julianus Pinem, “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan),” dalam <http://repository.usu.ac.id> diunduh pada 18 Maret 2019.

ongkos produksi, omset penjualan, keuntungan, dan jam kerja yang meningkat sebelum dan sesudah mendapatkan dana KUR.⁹

Penelitian Adrey Julianus Pinem, V. Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani Utami yang telah dipaparkan secara sekilas diatas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam upaya meningkatkan usaha. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya dimana dalam penelitian pertama dan kedua membahas tentang implementasi Kredit Usaha Rakyat apakah efektif atau tidak dan analisis dampak dari Kredit Usaha Rakyat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peranan Kredit Usaha Rakyat terhadap pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah.

⁹ V. Wiratna Sujarweni Dan Lila Retnani Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)", Vol. 22 No. 1. Maret 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.¹ Jumlah kredit yang disalurkan oleh sebuah bank kepada masyarakat bersumber dari dana bank bersangkutan.²

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu*

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-3 (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2013), 93.

² I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 44.

dengan pemberian bunga. Kredit ini merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (debitur).³

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁴

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Skema KUR secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Kredit Usaha Rakyat adalah program kredit yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. ke-13 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 113.

⁴ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Kebijakan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018), 6.

⁵ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Depkominfo, 2008), 18-20.

memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia.

2. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Dalam peraturan tersebut, terdapat 12 ketentuan baru yaitu terkait penurunan suku bunga, kelompok usaha sebagai penerima KUR, skema KUR Khusus, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, skema KUR multisektor, mekanisme pembayaran yarnen, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, jumlah plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, struktur biaya KUR Penempatan TKI, KUR untuk masyarakat perbatasan, dan KUR untuk optimalisasi KUBE.⁶

3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:⁷

1. Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
2. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi
3. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018), 1-2.

⁷ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat.*, 2.

4. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, bahwa:⁸

- a) Penerima KUR terdiri dari:
 - 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 2) Calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - 3) Calon pekerja magang di luar negeri;
 - 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
 - 5) Tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
 - 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
 - 8) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
- b) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan.*, 14-31.

- c) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan pinjaman KUR.
- d) Jenis Penyaluran KUR, terdiri atas:
 - 1) KUR mikro;
 - (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
 - (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
 - (3) Jangka waktu KUR mikro:
 - (a) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - (b) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
 - (4) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima

KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

2) KUR kecil;

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil:
 - (a) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - (b) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo

sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.

- 3) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;
 - (a) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (b) Suku Bunga/Marjin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
 - (c) Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 4) KUR khusus
 - (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas

perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.

- (2) KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- (3) Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (4) Jangka waktu KUR khusus:
 - (a) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - (b) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- 5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

5. Persyaratan untuk Mengajukan Kredit Usaha Rakyat

Untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat ke suatu lembaga perbankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi yaitu:⁹

- c. Bagi Perorangan
 - 1) Aplikasi permohonan.
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) & pasangan.
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - 4) Fotocopy Surat Nikah / Surat Cerai bagi calon debitur yang telah berkeluarga/telah bercerai.
 - 5) Asli Surat Izin Usaha (IUMK) atau surat perizinan usaha mikro dan kecil.
 - 6) Bilamana dipersyaratkan agunan/jaminan tambahan, maka dapat dilengkapi dengan : fotocopy dokumen agunan, fotocopy KTP pemilik (suami-isteri) dan dokumen pendukung lainnya.
 - 7) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 buah milik calon debitur dan pasangan.
 - 8) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/lembaga keuangan lainnya dalam 6 bulan terakhir (bila ada).

- b. Bagi Badan Usaha
 - 1) Aplikasi permohonan.
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi (management) dan Komisaris/Komanditer (pemilik).
 - 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama badan usaha.
 - 4) Fotocopy SPT atas nama badan usaha.
 - 5) Fotocopy Surat Izin Usaha (minimal memiliki SIUP, SITU, TPD).
 - 6) Dokumen agunan/jaminan tambahan yang dilengkapi dengan : fotocopy dokumen agunan, fotocopy KTP pemilik (suami-isteri) dan dokumen pendukung lainnya seperti IMB/PBB/STNK/Hasil Fisik Kepolisian Kendaraan Bermotor/ dsb.
 - 7) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 buah milik Direksi dan Komisaris/Komanditer.

⁹ <https://banklampung.co.id/produk/kredit/kmkki-kur>. Diunduh pada 17 Maret 2019.

- 8) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/ lembaga keuangan lainnya atas nama badan usaha dalam 6 bulan terakhir (bila ada)
- 9) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/ lembaga keuangan lainnya atas nama Direksi dan Komisaris/ Komanditer dalam 6 bulan terakhir (bila ada)
- 10) Fotocopy tabungan/ print out rekening giro Bank Lampung atas nama calon debitur.

B. Pemberdayaan UMKM

1. Pengertian Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.¹⁰ Dalam Kamus Besar, istilah Pemberdayaan berasal dari kata akar “daya”, yang berarti tenaga atau kekuatan. Kata asal itu diberi awalan “ber” sehingga berbunyi “berdaya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Kemudian kata berdaya diberi awal “pe” dan akhiran “an” menjadi pemberdayaan yang mempunyai arti menjadikan mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.¹¹

¹⁰ Fitri Maliana Nugraha, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat”, dalam <http://repository.fisip-untirta.ac.id/581/1/> diunduh pada 9 Januari 2019.

¹¹ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), 111.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:¹²

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

¹² Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 112-113.

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, pengertian Usaha Kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.”¹³

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan

¹³ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 45.

tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun Usaha Mikro, kecil dan Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

a. Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- 5) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang

¹⁴ Dewi Angraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM", Jurnal ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, 109-110.

b. Usaha Kecil

- 1) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- 2) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- 3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.
- 5) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

c. Usaha Menengah

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- 4) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 5) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Batasan atau kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut beberapa organisasi adalah sebagai berikut :¹⁵

Tabel 2.1
Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

Organisasi	Jenis Usaha	Keterangan Kriteria
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar
	Usaha Kecil	Pekerja 5-19 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20-99 orang
Meneg Koperasi & PKM	Usaha Kecil (UU No.9/1995)	Aset < Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan Omzet tahunan < Rp. 1 Milyar
	Usaha Menengah (Inpres 10/1999)	Aset Rp. 200 - Rp. 10 Milyar
Bank Indonesia	Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998)	Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga Sumberdaya lokal dan Teknologi sederhana
	Usaha Kecil (UU No.	Aset < Rp. 200 Juta diluar

¹⁵ Lip Saripah dan Erna Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak Lanjut Program PKH PNFI* (Bandung: April Media, 2011), 26.

	9/1995)	tanah dan bangunan: Omzet tahunan < Rp. 1 Milyar
	Usaha Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 januari 1997)	Aset < Rp. 5 Milyar untuk sektor industri Aset < Rp. 600 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan < Rp. 3 Milyar
Bank Dunia	Usaha Mikro Kecil - Menengah	Pekerja < 20 orang <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja 20-50 orang • Aset < US\$. 500 Ribu diluar tanah dan bangunan

Menurut Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara senergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁶

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau dunia usaha dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu untuk berkembang.

2. Prinsip pemberdayaan UMKM

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Nur Syamsi Nurlan, *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah Dan UMKM* (Jakarta: Ka-tulis-tiwa Press, 2008), 71.

¹⁷ *Ibid.*, 75-76.

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3. Dampak Program Pemberdayaan UMKM

Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Usaha Program pemberdayaan baik berupa pelatihan, pemberian dana, maupun fasilitasi lainnya pada dasarnya diberikan untuk meningkatkan usaha UMKM sekaligus membuatnya menjadi lebih mandiri.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU UMKM No. 20 Tahun 2008 pasal 5 adalah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Sebenarnya ada banyak program yang bisa dilakukan untuk memberdayakan UMKM antara lain pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha, pembinaan organisasi, perizinan, promosi, dan permodalan.

Salah satu ukuran keberhasilan program pemberdayaan adalah terjadi peningkatan usaha. Peningkatan usaha dapat dilihat dari kinerja usaha, misal penjualan, nilai tambah, keuntungan atau dilihat dari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas misalnya penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain. Selain itu efektivitas program pemberdayaan dapat pula dilihat dari tiga hal, yaitu : (1) Kepuasan pelanggan dengan layanan jasa pengembangan usaha (2) Peningkatan kualitas UMKM, (3) Menambah manfaat UMKM yang dapat dilihat dari indikator perubahan laba, perubahan jumlah produksi, ataupun perubahan kualitas produksi.¹⁸

4. Faktor Kendala dan Potensi Efektivitas Program Pemberdayaan

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang banyak memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha ini menyerap tenaga kerja di sekitarnya sehingga memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraan keluarga di sekitar usaha. Selama ini

¹⁸ Ida Susi Dewanti, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro: Kendala Dan Alternatif Solusinya", Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 6. No. 2 Januari 2010, 6.

banyak skema program pemberdayaan yang dikucurkan bagi UMKM ini, namun ternyata belum semua program berhasil.

Beberapa kendala maupun pendorong efektivitas program pemberdayaan yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil antara lain:¹⁹

- a. Waktu. Pada pengusaha kecil yang notabene sudah lama membuka usaha, maka waktu menjadi kendala untuk menerapkan hasil pelatihan maupun untuk ikut serta dalam pelatihan. Untuk menerapkan hasil pelatihan, misalnya pelatihan manajemen pengelolaan usaha, maka pengusaha terpaksa harus merubah cara maupun kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan dan perubahan ini dianggap membutuhkan waktu. Sedangkan untuk mengikuti pelatihan mereka juga harus meluangkan waktu dari rutinitas kerja dan usaha sehari-hari, padahal biasanya banyak aktivitas yang membutuhkan koordinasi maupun pengawasan dari mereka sehingga berat bagi mereka untuk keluar dari rutinitas tersebut.
- b. Sumber daya. Sumber daya ini biasa berupa dana maupun manusia. Pada usaha kecil dan mikro sumber daya manusia yang utama adalah pengusaha itu sendiri. Padahal mereka juga telah terbebani dengan tanggung jawab yang lain, sehingga sulit bagi mereka untuk menjalankan beragam tanggung jawab tersebut.

¹⁹ *Ibid.*., 7-8.

Sementara itu jika mendelegasikan tanggung jawab administrasi kepada orang lain belum sepenuhnya percaya.

- c. Sikap. Sikap dalam hal ini bisa dianggap pula sebagai motivasi. Beberapa pengusaha masih bersikap pasif dan apriori terhadap keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya program pemberdayaan tersebut, terutama pelatihan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan terbukti dengan beratnya mereka untuk meninggalkan aktivitas rutin.
- d. Jaringan dan informasi. Jaringan yang terbatas membuat informasi yang diperoleh juga terbatas. Padahal informasi ini sangat bermanfaat untuk menangkap peluang yang mungkin dibutuhkan.

C. Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau serta didukung fasilitas penjaminan.

Untuk itu, Menteri Keuangan pada tanggal 24 September 2008 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan KUR tersebut diberikan oleh perusahaan penjamin yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit atau pembiayaan untuk membantu

UMKM-K guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari Bank Pelaksana. Bank pelaksana yang dimaksud adalah Bank Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan.²⁰

KUR adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 Juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin

UMKM-K harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-*cover* dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 persen dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial bank.²¹

Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. KUR akan dioptimalisasi untuk memperkuat dan meningkatkan akses

²⁰ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat.*, 20-21

²¹ *Ibid.*,h. 28.

permodalan bagi UMKM. Pemberian kredit dengan jaminan pemerintah ini diharapkan bisa membuat UMKM lebih berkembang.²²

²² *Ibid.*,h. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indera.¹ Penelitian lapangan dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai

¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, KebijakanPublik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142.

metode alami.² Penelitian ini menggambarkan mengenai peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³ Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara di lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yakni :

- a. Pihak bank (*Supervisor Bisnis dan Account Officer*) Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya
- b. Nasabah KUR Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari buku-buku dan jurnal skripsi tentang peranan KUR dan pemberdayaan UMKM, diantaranya buku karya Ismail dengan judul *manajemen perbankan*, buku karya Kasmir dengan judul *Dasar-Dasar*

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 129.

⁴ *Ibid.*

Perbankan, buku karya Mukti Fajar dengan judul *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.⁵ Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah/bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi obyek wawancara yaitu :

- a. Bapak M. Budi Mulyawan selaku *Supervisor Bisnis*, dan Ibu Yasmin selaku *Account Officer* Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya
- b. Tuti Ningsih, Bapak Samim, Bapak Mustafa, dan Bapak Suherman selaku nasabah KUR BPD Lampung KC Bandar Jaya

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 135.

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa nasabah KUR Bank Pembangunan Daerah Lampung tersebut menggunakan teknik *simple random sampling*.

Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan cara *Purposive Sampling* yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷ Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria nasabah yang menjadi sumber penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bersedia menjadi informan
- 2) Nasabah adalah nasabah yang mengajukan pinjaman KUR

2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu dokumen yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah arsip struktur organisasi, brosur-brosur produk

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 82.

⁸ *Ibid.*, 240.

UMKM Bank Pembangunan Daerah Lampung, dan data-data dokumentasi lainnya.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.¹⁰ Cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan demikian, bahwa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif induktif.

Meurut Sugiyono, analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 402.

¹⁰ *Ibid.*, 402.

lapangan.¹¹ Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis kemudian menarik kesimpulan secara umum mengenai peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya.

¹¹ *Ibid.*, 402.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya

1. Sejarah Perkembangan BPD Lampung KC Bandar Jaya

Bank Lampung merupakan Bank milik Pemerintahan Daerah Lampung yang pada saat pembentukannya berbentuk Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Nomor 10-A/1964 tanggal 01 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat pengesahan Nomor : DES.57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965 serta telah mendapat persetujuan Izin Usaha dari Menteri Bank Sentral Republik Indonesia Nomor : Kep.66/UBS/1965 tanggal 13 Agustus 1965. Bank Pembangunan Daerah Lampung mulai beroperasi pada tanggal 31 Januari 1966.¹

Tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah untuk mengelola keuangan daerah, yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.² Ketika

¹ Wawancara dengan Bapak M. Budi Mulyawan selaku *Supervisor Bisnis* BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Senin, 12 Mei 2019, pukul 10.30 WIB.

² Dokumentasi berupa website dari www.banklampung.co.id, diakses pada hari Jum'at, 3 Mei 2019, pukul 05.30 WIB.

berbentuk Perusahaan Daerah (PD), terdapat peningkatan-peningkatan modal dasar BPD Lampung sebagai berikut:³

- a. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1973 tanggal 9 Oktober 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai Surat Mendagri Nomor : Pem.10/28/39/161 Tahun 1975 tanggal 13 September 1975 modal dasar Bank sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Terjadi peningkatan modal dasar yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 1979 tanggal 26 November 1979 menjadi sebesar Rp. 1 miliar.
- c. Pada tahun 1984 terjadi peningkatan yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 10 Desember 1984, menjadi Rp 5 miliar.
- d. Pada tahun 1990 terjadi peningkatan modal dasar sesuai Perda Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 7 Juni 1990, menjadi sebesar Rp. 10 miliar.
- e. Pada tahun 1992 terjadi peningkatan modal dasar sesuai Perda Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 10 Desember 1992, menjadi sebesar Rp 25 miliar.

Selanjutnya Bank Pembangun Daerah Lampung merubah status Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2

³ *Ibid.*

Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Soekarno, SH Notaris di Bandar Lampung dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8261.HT01.01 Tahun 1999 tanggal 6 Mei 1999 dengan modal dasar bank sebesar Rp. 70 miliar. Saat ini anggaran dasar Bank Lampung telah disesuaikan menurut UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Bank Lampung No. 4 Tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Augusnani Sulasman, S.H.dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.No.AHU-24771.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008 dan perubahan terakhirnya sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank Lampung No.109 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Fahrul Rozi, S.H. notaris di Bandar Lampung.⁴

Pada tahun 2012 ditetapkan bahwa modal dasar Bank Lampung sebesar Rp. 500 miliar sesuai dengan akta risalah Keputusan RUPSLB Bank Lampung Nomor : 11 tanggal 11 April 2011 yang dibuat dihadapan Achmad Mulya Notaris di Bandar Lampung dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 7 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012 Penambahan Penyertaan Modal

⁴ *Ibid.*

Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.⁵

2. Visi dan Misi BPD Lampung KC Bandar Jaya

a. Visi

Menjadi Bank Regional Terkemuka dan Terpercaya di Lampung

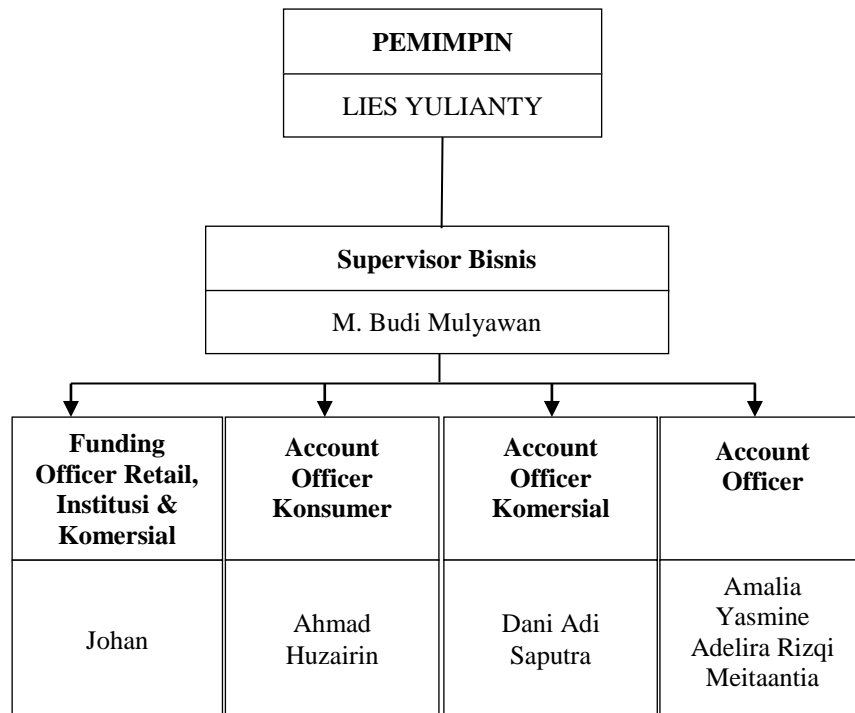
b. Misi

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan;
- 2) Memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional;
- 3) Mempunyai daya saing tinggi;
- 4) Tersedianya SDM yang berkualitas & memiliki kompetensi tinggi;
- 5) Memiliki struktur permodalan yang kuat;
- 6) Pengembangan infrastruktur informasi teknologi;
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan dan corporate image di masyarakat serta meningkatkan kualitas pengendalian intern;
- 8) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Dokumentasi berupa website dari www.banklampung.co.id, diakses pada hari Jum'at, 3 Mei 2019, pukul 06.00 WIB.

3. Struktur Organisasi Divisi Kredit PT BPD Lampung KC Bandar Jaya



Gambar 1.
Struktur Organisasi Divisi Kredit PT BPD Lampung KC Bandar Jaya

Keterangan :

a. Pemimpin Cabang

Bertanggungjawab untuk memimpin Kantor Cabang demi tercapainya Sasaran Bisnis di Kantor Cabang, terjaganya kepuasan nasabah, terjaganya hubungan baik dengan mitra kerja, terjaminnya validitas dan akuntabilitas seluruh transaksi di cabang, serta terkendalinya aspek kepatuhan dan risiko pada seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang.

b. *Supervisor Bisnis (SPV. Bisnis)*

Bertanggungjawab untuk mencapai target bisnis Kredit UMKM, Komersial, Program Cabang, menjaga kualitas portofolio kredit komersial, mengelola dan memproses kegiatan yang berlangsung diperusahaan, memastikan keefisien kerja bawahan, memantau dan mengevaluasi cara kerja karyawan, dan mengambil keputusan sesuai dengan batasan jabatannya.

c. *Funding Officer Retail, Institusi dan Komersial*

Bertanggungjawab untuk menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang sebagai pedoman kerja, menyusun rencana kerja tiga bulanan dan bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, dan mewakili PT.Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam negosiasi dengan calon nasabah sesuai batas kewenangannya.

d. *Account Officer Konsumer*

Bertanggungjawab untuk mencapai target bisnis kredit konsumer cabang, serta menjaga kualitas portofolio kredit konsumer

e. *Account Officer Komersial*

Bertanggungjawab untuk mencapai target bisnis kredit komersial cabang, serta menjaga kualitas portofolio kredit komersial.

f. *Account Officer*

Bertanggungjawab untuk mencapai target dana dan fee based income cabang, serta meningkatkan kualitas hubungan Cabang dengan nasabah khususnya nasabah prioritas.

4. **Produk-Produk UMKM BPD Lampung KC Bandar Jaya**

Produk-produk BPD Lampung KC Bandar Jaya yang disalurkan untuk UMKM:

a. **Kredit Aneka Usaha**

Kredit yang diberikan kepada pengusaha perorangan maupun kelompok untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik investasi maupun kebutuhan modal kerja.⁷

1) **BPD Peduli**

Pinjaman untuk kelompok usaha mikro yang termasuk dalam skim kredit ini adalah kredit aneka usaha dengan plafond kredit s/d 50 juta. Merupakan fasilitas kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diperuntukan bagi usaha kecil baik perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usaha mikro.⁸

⁷ Dokumentasi berupa website dari www.banklampung.co.id , diakses pada hari Jum'at, 3 Mei 2019, pukul 06.20 WIB.

⁸ Dokumentasi berupa brosur dari BPD Lampung.

2) Pikul

Kependekan dari Pinjaman Kelompok Usaha Kecil yang termasuk dalam skim kredit adalah kredit aneka usaha dengan plafond kredit diatas 50 juta s/d 200 juta. Merupakan fasilitas kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diperuntukan bagi usaha kecil baik perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya.⁹

b. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Program pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perbankan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Persyaratan pengajuan KUR ke BPD Lampung:

- 1) Aplikasi permohonan.
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) & pasangan.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Fotocopy Surat Nikah / Surat Cerai bagi calon debitur yang telah berkeluarga/telah bercerai.
- 5) Asli Surat Izin Usaha (IUMK) atau surat perizinan usaha mikro dan kecil.

⁹ *Ibid.*

- 6) Bilamana dipersyaratkan agunan/jaminan tambahan, maka dapat dilengkapi dengan : fotocopy dokumen agunan, fotocopy KTP pemilik (suami-isteri) dan dokumen pendukung lainnya.
- 7) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 buah milik calon debitur dan pasangan.
- 8) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/lembaga keuangan lainnya dalam 6 bulan terakhir (bila ada).

Dan bagi Badan Usaha adalah :

- 1) Aplikasi permohonan.
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direksi (management) dan Komisaris/Komanditer (pemilik).
- 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama badan usaha.
- 4) Fotocopy SPT atas nama badan usaha.
- 5) Fotocopy Surat Izin Usaha (minimal memiliki SIUP, SITU, TPD).
- 6) Dokumen agunan/jaminan tambahan yang dilengkapi dengan : fotocopy dokumen agunan, fotocopy KTP pemilik (suami-isteri) dan dokumen pendukung lainnya seperti IMB/PBB/STNK/Hasil Fisik Kepolisian Kendaraan Bermotor/ dsb.

- 7) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 buah milik Direksi dan Komisaris/Komanditer.
- 8) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/ lembaga keuangan lainnya atas nama badan usaha dalam 6 bulan terakhir (bila ada)
- 9) Print out mutasi rekening giro/tabungan di Bank Lampung/ lembaga keuangan lainnya atas nama Direksi dan Komisaris/ Komanditer dalam 6 bulan terakhir (bila ada)
- 10) Fotocopy tabungan/ print out rekening giro Bank Lampung atas nama calon debitur.

Suku bunga, sesuai yang berlaku saat pengajuan (7% p.a efektif).¹⁰

B. Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya

Kehadiran BPD Lampung dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu kalangan usaha mikro, kecil dan menengah menjadikan lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan pengusaha, pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR yang plafondnya sampai dengan Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak

¹⁰ Dokumentasi berupa website dari *www.banklampung.co.id*, diakses pada hari Jum'at, 3 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

BPD Lampung. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%. Sedangkan KUR diatas Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta) agunan harus 100% atau lebih.

Program KUR tentu tidak jalan mulus begitu saja, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya.

a. Faktor pendukung program KUR di Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya adalah sebagai berikut:

1) Bunga yang ditetapkan rendah

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Penurunan tingkat suku bunga KUR yang awalnya 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun. Dengan bunga yang cukup rendah diharapkan nasabah tidak merasa terbebani dan optimal dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini suku bunga KUR yang ditetapkan oleh bank mengalami penurunan dari 9% menjadi 7%, dengan rendahnya suku bunga tersebut diharapkan nasabah dapat lebih optimal lagi dalam kegiatan usahanya”¹¹

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Senin, 13 Mei 2019, pukul 11.30 WIB.

2) Tidak ada biaya profesi administrasi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini berlaku suku bunga 7 persen efektif per tahun dan tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi. Masyarakat diharapkan tidak khawatir mengajukan KUR karena berbagai kemudahan sudah diberikan bank penyalur. Provisi itu sendiri adalah biaya yang dibebankan oleh pihak perbankan kepada debitur sebagai imbalan atas jasa bank karena telah menyetujui pinjaman yang diajukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi. Karena tanpa adanya biaya provisi dan administrasi inilah daripada mencari dana lewat rentenir lebih baik mengajukan KUR dengan murah ke BPD Lampung KC Bandar Jaya”¹²

b. Faktor penghambat program KUR di Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya adalah sebagai berikut :

1) Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

¹² *Ibid.*

“Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur. Pada dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering kali. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.”¹³

2) Agunan yang diberikan oleh nasabah terkadang tidak sesuai

Saat mengajukan pinjaman ke bank terkadang agunan yang berikan oleh nasabah tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“Nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank lampung terkadang agunannya tidak marketable, misalnya nasabah mengajukan pinjaman 50 Juta tapi agunannya hanya tanah kosong dan lokasinya jauh dipelosok”¹⁴

3) Nasabah yang mengajukan kredit ternyata masih memiliki pinjaman dibank lain dan nasabah yang bersangkutan tidak bisa melunasinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“Nasabah yang mengajukan kredit setelah diperiksa di BI Checking ternyata masih memiliki pinjaman dibank lain dan nasabah yang bersangkutan tidak bisa melunasinya.”¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

4) Kredit bermasalah

Resiko kredit adalah kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan bahwa:

“Kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa faktor pendukung dalam penyaluran KUR adalah bunga yang ditetapkan rendah, tidak ada biaya profisi administrasi dan faktor penghambatnya adalah calon debitur yang tidak mempunyai keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur, agunan yang diberikan oleh nasabah terkadang tidak sesuai, nasabah yang mengajukan kredit ternyata masih memiliki pinjaman dibank lain dan nasabah yang bersangkutan tidak dapat melunasinya, dan terjadinya kredit bermasalah.

¹⁶ *Ibid.*

Setelah mengetahui praktik pinjaman KUR serta faktor pendukung dan penghambat program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya, peneliti akan menjelaskan bagaimana peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Jaya.

Peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alternatif sumber pendanaan eksternal dengan bunga rendah

Dalam pemberdayaan UMKM terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah terbatasnya permodalan. Untuk itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan bunga rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Budi Mulyawan selaku *Supervisor Bisnis* BPD Lampung KC Bandar Jaya. Plafon KUR yang ditetapkan di BPD Lampung yaitu 1 hingga 25 Juta, dan 25 hingga 500 Juta. Dimana dana yang sudah dikeluarkan oleh bank pada tahun 2018 untuk Kredit Usaha Rakyat sejumlah 5,083 milyar (lima milyar delapan puluh tiga juta) dan disalurkan kepada 64 debitur. Dana untuk KUR Kecil 1,1 miliar (satu miliar setarus juta) disalurkan kepada 3 debitur, dana untuk KUR Mikro sebesar 3,093 miliar (tiga miliar sembilan puluh tiga juta) disalurkan kepada 61 debitur.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak M. Budi Mulyawan selaku *Supervisor Bisnis* BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Selasa, 14 Mei 2019, pukul 10.30 WIB.

Menurut beberapa nasabah yang peneliti wawancarai, mereka merasa terbantu dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) tersebut, karena bunga yang ditetapkan dirasa ringan dan tidak memberatkan. Seperti halnya ibu Ani Asrofatul yang meminjam KUR sebesar 25 Juta, uang tersebut digunakan untuk menambah modal usaha warung sembako miliknya. Saat ini usahanya semakin berkembang karena uang pinjamannya tersebut digunakan untuk usaha yang produktif dan bunganya ringan. Bapak Sukirno yang merupakan agen gas elpiji, meminjam KUR sebesar 50 Juta untuk menambah modal usahanya. Beliau merasa sangat terbantu karena bunga yang diberikan dirasa ringan dari pada pinjaman yang lainnya.¹⁸

b. Perkembangan usaha yang dilihat dari omzet

Dengan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat KUR. Meningkat atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari omzetnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah KUR, omzet penjualan mereka ada yang menjadi meningkat dan ada beberapa yang tetap setelah mendapatkan KUR. Usaha yang mengalami peningkatan itu dikarenakan pinjaman yang mereka ajukan tidak sedikit dan digunakan untuk usaha yang produktif. Dan

¹⁸ Wawancara dengan nasabah KUR BPD Lampung KC Bandar Jaya

usaha yang tetap itu karena pinjaman yang diberikan tidak semuanya digunakan untuk usaha mereka, melainkan untuk kegiatan konsumtif. Pihak PBD sebagai pemberi modal terkadang melakukan pemantauan usaha serta memberi masukan dan saran mengenai model atau hal-hal yang sedang diminati masyarakat. Dan setiap bulannya atau dua bulan sekali pihak bank akan mendatangi langsung usaha nasabah untuk melihat perkembangannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yasmin selaku AO (*Account Officer*) di BPD Lampung KC Bandar Jaya, beliau mengatakan:

“setelah KUR cair, pihak bank tidak hanya memberikan modal namun ikut serta memberi saran atau masukan kepada UMKM, pihak bank juga melakukan pemantauan, pemantauan dilakukan untuk melihat benar atau tidaknya kredit tersebut digunakan untuk modal kerja.”

c. Meningkatkan taraf hidup para wirausahawan atau pengusaha UMKM

Jumlah permintaan yang meningkat tentunya akan menghasilkan keuntungan yang besar pula, yang berimbas pada meningkatnya keuntungan bagi pengusaha UMKM yang tentunya akan menaikkan taraf hidup pengusahanya.

Berdasarkan penelitian dilapangan, beberapa nasabah yang meminjam KUR mengalami peningkatan taraf hidup, karena ada modal kini usaha yang dijalannya terus berkembang. Seperti bapak Suherman, selaku nasabah KUR BPD Lampung yang mengajukan pinjaman 500 juta untuk usaha toko bangunan, dulu usahanya kecil

dan tidak banyak yang dijual kini usahanya semakin meningkat dan berkembang, saat ini beliau memiliki banyak karyawan untuk membantunya.

- d. Membantu pengusaha kecil menengah untuk fokus pada kinerja produktivitas

Dengan mengambil pembiayaan KUR berarti ada tambahan modal yang diperlukan guna mengembangkan usaha, para pengusaha tidak terlalu dipusingkan dengan modal, hanya fokus bagaimana meningkatkan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Sebelum adanya KUR, para pemilik usaha kebingungan mencari tambahan modal dikarenakan bunga yang besar, yang justru mempersulit nantinya, karena keuntungan habis untuk membayar cicilan kredit dan bunganya. KUR dianggap fleksibel serta mudah dan dapat dirasakan oleh usahawan kecil, dengan bunga 7% pertahunnya dirasa tidak memberatkan bagi mereka, sehingga dengan bunga yang kecil menjadikan penjualan tidak terpengaruh karena pembayaran kredit yang tidak membebani.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya dapat dilihat dari bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat.

Bapak Nursalim yang beralamatkan di desa Tanggul kecamatan punggur dengan usaha menjual kebutuhan pertanian. Dengan modal awal lebih dari 500 Juta, pak Nursalim menyediakan berbagai macam obat-obatan pertanian, bibit pertanian, perlengkapan pertanian dan masih banyak lagi. Bapak Nursalim mengetahui adanya KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya karena ada pegawai bank yang datang kerumah dan menawarkan produk tersebut, mungkin karena melihat usaha pak Nursalim yang maju. Omzet yang pak Nusalim dapatkan tentu sangat besar. Saat ini pak Nursalim mempunyai 3 cabang toko pertanian.¹⁹

Bapak Suherman yang beralamatkan di desa Srimulyo dengan usaha toko bangunan, dulu awalnya usahanya kecil dimana hanya menjual masing-masing barang minimal dua jenis, atau istilahnya jualan ricikan dahulu tanpa pasir, semen, batu kali dll, jualannya seperti alat-alat bangunan, kuas cat, gergaji, paku,dll. Intinya yang sekiranya orang beli bisa bawa barangnya sendiri tanpa perlu diantar. Bapak Suherman mengetahui adanya KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya karena ada pegawai bank yang datang kerumah dan menawarkan produk tersebut. Dulu modal awal yang bapak suherman gunakan untuk membuka usaha toko bangunan ini sebesar 75 juta dan usahanya terus berkembang. Omzet perbulan sebelum mendapatkan KUR sekitar 20 Juta, karena melihat usahanya yang ramai pembeli bapak suherman tertarik untuk mengajukan pinjaman KUR ke BPD Lampung. Beliau mengajukan KUR untuk tambahan modal

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nursalim selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Senin, 10 Mei 2019, pukul 09.15 WIB.

mengembangkan usaha sebanyak 500 Juta. Proses bapak Suherman mendapatkan KUR sangat panjang karena pinjamannya yang besar, bapak Suherman harus datang ke BPD Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, setelah itu bapak Suherman diberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR, bapak Suherman pun menyerahkan persyaratan ke pihak bank. Lalu diwawancarai mengenai prospek usaha kedepannya dan selanjutnya diminta menunggu keputusan bank. Setelah dana cair pihak bank juga melakukan pemantauan, pemantauan dilakukan untuk melihat benar atau tidaknya kredit tersebut digunakan untuk modal kerja. Dengan dana KUR tersebut bapak Suherman merasa sangat terbantu, setelah mendapatkan dana KUR omzet bapak Suherman sebesar 35 Juta.²⁰

Bapak Mustafa kamal yang beralamatkan di gunung sugih, dengan usaha kelontong. Bapak Mustafa mengetahui KUR di BPD Lampung karena ada pegawai bank yang menawarkan. Dulu modal awal yang digunakan untuk membuka usaha kelontong adalah sebesar 30 Juta. Omzet perbulan sebelum mendapatkan KUR adalah 10 Juta dan keuntungan yang diperoleh pak Mustafa adalah 3 Juta setelah dikurangi biaya operasional bulanan. Karena modal terbatas dan ingin mengembangkan usahanya akhirnya pak Mustafa mengajukan pinjaman KUR sebesar 200 Juta ke BPD lampung. Proses pak Mustofa Kamal mendapatkan KUR yaitu awalnya datang ke bank untuk mengajukan permohonan KUR dan oleh pihak bank dijelaskan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suherman selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Senin, 06 Mei 2019, pukul 09.15 WIB.

mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, setelah semua persyaratan di kumpulkan kebank, pak mustafa kamal diminta menunggu hasil dari pimpinan. Setelah KUR cair uangnya pun digunakan pak Mustafa untuk membeli keperluan usaha. Dan setelah beberapa bulan ada pihak bank yang datang untuk melakukan pemantauan, mereka bertanya adakah permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dan lain sebagainya. Dengan pinjaman KUR yang bunganya ringan tersebut jelas sangat membantu usaha pak Mustafa. Dan saat ini setelah mendapatkan KUR omzet pak Mustafa kamal sebesar 18 Juta.²¹

Bapak Sukirno yang beralamatkan di desa Purworejo, dengan usaha jual beli gas elpiji. pak Sukirno mengetahui adanya KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya karena mendengar dari temannya. Modal awal bapak Sutrisno membuka pangkalan elpiji sekitar 25 Juta. Karena membutuhkan tambahan modal pak Sukirno mendatangi BPD dengan mengajukan pinjaman sebesar 50 Juta. Omzet awal pak Sukirno sebelum mendapatkan KUR adalah sebesar 20 Juta. Prosesnya pak Sukirno mendapatkan KUR sama dengan proses pinjaman lainnya, bedanya KUR bunganya lebih rendah. Tak hanya memberi tambahan modal saja kepada pengusaha tapi pihak bank melakukan pemantauan ke rumah dan menelpon satu hingga dua bulan sekali untuk menanyakan perkembangan usaha. Dan pak Sukirno

²¹ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Senin, 06 Mei 2019, pada pukul 01.35 WIB.

merasa sangat terbantu sekali, karena bunganya ringan ia tidak merasa terbebani. Saat ini omzet bapak Sukirno sekitar 40 Juta perbulan.²²

Bapak Agus yang beralamatkan didesa Buyut Ilir , dengan usaha bengkel. Pak Agus mengetahui adanya program KUR ini karena temannya yang mengajak untuk mengajukan pinjaman bersama. Usaha pak Agus awalnya bermodalkan sekitar 15 Juta dan omzetnya perbulan sekitar 8 Juta. Karena tertarik dengan ajakan temannya tersebut dan ingin mengembangkan usahanya pak Agus pun datang ke Bank untuk mengajukan pinjaman sebesar 25 Juta. Proses mengajukannya pinjaman lumayan mudah karena menurut yang diketahui pak Agus yang terpenting adalah usaha yang dimiliki nasabah itu memiliki prospek yang bagus, karena merasa usaha bengkelnya ramai maka pak Agus yakin bahwa pinjamannya disetujui oleh pihak Bank. Setelah kredit cair maka pak Agus datang ke bank untuk mengurus segala administrasi yang harus diselesaikan, tak hanya memberi solusi tambahan modal saja, pihak bank juga memantau usaha yang dijalankan pak Agus. Dan jelas, program KUR ini sangat membantu sekali para pengusaha yang membutuhkan modal dengan bunga ringan. Omzet pak Agus saat ini adalah sebesar 15 Juta.²³

Ibu Ani Asrofatul yang beralamatkan didesa Astomulyo, dengan usaha warung sembako. Bu Ani mendengar adanya program KUR di BPD Lampung dari saudaranya yang mengajukan pinjaman di bank tersebut.

²² Wawancara dengan Bapak Sukirno selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Kamis , 09 Mei 2019, pukul 10.15 WIB.

²³ Wawancara dengan Bapak Agus selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Jum'at , 10 Mei 2019, pukul 09.35 WIB.

Modal awal bu Ani Asrofatul usaha warung sembako adalah 10 Juta. Omzet perbulan yang diperoleh sebelum mendapatkan KUR sekitar 6 Juta, dan keuntungan bersih 2 Juta. Bu Ani mengajukan pinjaman sebesar 25 Juta karena ia tak mempunyai uang simpanan. Jika ditanya proses, menurut bu Ani prosesnya mudah tinggal datang saja ke bank dengan meminta surat permohonan dan melengkapi persyaratan, lalu diwawancarai dan tinggal menunggu kabar dari pihak bank apakah pinjaman yang diajukan diterima atau ditolak. Setelah kredit cair pihak bank melakukan pemantauan sekali . Omzet usaha bu Ani Asrofatul setelah mendapatkan KUR menjadi 15 juta, dengan keuntungan bersih 4 Juta .²⁴

Berikut adalah beberapa nasabah KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya:

Tabel 4.1
Nasabah KUR BPD Lampung KC Bandar Jaya

Nama	Jenis Usaha	Biaya Modal Awal	Jenis UMKM
Nursalim	Obat-obatan Pertanian	500 Juta	Usaha Menengah
Suherman	Toko Bangunan	75 Juta	Usaha Kecil
Mustafa Kamal	Kelontong	30 Juta	Usaha Mikro
Sukirno	Jual Gas Elpiji	25 Juta	Usaha Mikro
Agus	Usaha Bengkel	15 Juta	Usaha Mikro
Ani Asrofatul	Warung Sembako	10 Juta	Usaha Mikro

Sumber: Wawancara dengan nasabah KUR BPD Lampung KC Bandar Jaya

Jadi, dari data diatas dapat dipahami bahwa Kredit Usaha Rakyat sangat membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Ani Asrofatul selaku nasabah Kredit Usaha Rakyat BPD Lampung KC Bandar Jaya pada hari Selasa, 07 Mei 2019, pukul 02.00 WIB.

setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan, baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pinjaman yang diberikan oleh bank memiliki peranan sebagai alternatif sumber pendanaan eksternal dengan bunga rendah, dengan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat KUR, meningkatkan taraf hidup para wirausahawan atau pengusaha UMKM, dan membantu pengusaha kecil menengah untuk fokus pada kinerja produktivitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: “Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada BPD Lampung KC Bandar Jaya, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan, baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pinjaman yang diberikan oleh bank memiliki peranan sebagai alternatif sumber pendanaan eksternal dengan bunga rendah, dengan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat KUR, meningkatkan taraf hidup para wirausahawan atau pengusaha UMKM, dan membantu pengusaha kecil menengah untuk fokus pada kinerja produktivitas.

B. Saran

Dalam Upaya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BPD Lampung KC Bandar Jaya, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

2. Bagi Bank Pembangunan Daerah Lampung KC Bandar Jaya

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memaksimalkan Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pemberdayaan UMKM di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Komunikasi Dan Informatika. *Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: Depkominfo, 2008.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Kebijakan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018.
- Fajar, Mukti. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Farida, Ai Siti Farida. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cet. Ke-3. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. ke-13. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.
- Nurlan, Nur Syamsi. *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah Dan UMKM*. Jakarta: Ka-tulis-tiwa Press, 2008.
- Saripah, Lip, dan Erna Hernawati. *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak Lanjut Program PKH PNFI*. Bandung: April Media, 2011.
- Sudirmanm, I Wayan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Manajeme*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Anggraini, Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM." *Jurnal ekonomi dan Keuangan* Vol. 1. No. 3. Februari 2013, 109-110.

Dewanti, Ida Susi. "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro: Kendala Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 6. No. 2 Januari 2010.

Nugraha, Fitri Maliana. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat." Dalam <http://repository.fisip-untirta.ac.id/581/1/> diunduh pada 9 Januari 2019.

Pinem, Adrey Julianus. "Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)", dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29478> diunduh pada 18 Maret 2019.

Sudaryanto, ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean." Dalam www.kemenkeu.go.id diunduh pada 9 Januari 2019.

Sujarweni, V. Wiratna Dan Lila Retnani Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)", Vol. 22 No. 1. Maret 2015.

<https://banklampung.co.id/produk/kredit/kmki-kur>. Diunduh pada 17 Maret 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0388/ln.28.3/D.1/PP.00.9/01/2019

31 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A
 2. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Okta Septiana Wati
NPM : 1502100289
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Peranan Lembaga Keuangan Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC. Bandarjaya)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan *Supervisor Bisnis* BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - b. Apakah visi dan misi BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - c. Bagaimana struktur organisasi BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - d. Apa saja produk-produk kredit UMKM yang di tawarkan di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - e. Berapa plafon KUR yang ditetapkan BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - f. Berapa jumlah dana yang dikeluarkan oleh BPD Lampung KC Bandar Jaya untuk penyaluran KUR pada tahun 2018?

2. Wawancara dengan *Account Officer* BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - a. Bagaimana prosedur penyaluran KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - b. Apa sajakah syarat-syarat untuk mendapatkan KUR yang ada di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - c. Apakah pihak BPD hanya memberikan modal saja /atau ikut serta mengelola dan memantau usaha tersebut?
 - a. Bagaimanakah sistem pemantuan usaha di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - b. Bagaimana sistem pembayaran kredit yang ada di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
 - c. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

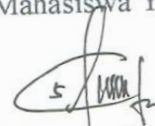
3. Wawancara dengan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - a. Dari manakah ibu dan bapak mengetahui adanya KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya ?
 - b. Berapa modal awal ibu dan bapak saat membuka usaha ?
 - c. Berapa omzet ibu dan bapak perbulan sebelum mendapatkan KUR?
 - d. Berapakah tambahan modal yang ibu dan bapak dapatkan di BPD Lampung KC Bandar Jaya untuk mengembangkan usaha?

- e. Apa yang menjadi alasan ibu dan bapak mengikuti program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya?
- f. Bagaimana proses bapak dan ibu mendapatkan KUR?
- g. Apakah ada pemantuan dari pihak BPD terhadap usaha yang dijalankan ibu dan bapak setelah mendapatkan KUR ?
- h. Apakah yang ibu dan bapak rasakan dengan adanya KUR yang diberikan oleh BPD Lampung KC Bandar Jaya?
- i. Berapa omzet ibu dan bapak perbulan setelah mendapatkan KUR?
- j. Berapa jumlah omzet bapak dan ibuk perbulan setelah mendapatkan KUR?

B. Dokumentasi

- 1. Visi dan Misi BPD Lampung KC Bandar Jaya
- 2. Struktur Organisasi BPD Lampung KC Bandar Jaya
- 3. Produk-produk BPD Lampung KC Bandar Jaya

Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN *ACCOUNT OFFICER* BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA

1. Bagaimana prosedur penyaluran KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Prosedur penyaluran KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya adalah nasabah tersebut datang ke bank dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, setelah itu pihak bank akan mengeceknya di BI checking untuk melihat apakah nasabah tersebut memiliki pinjaman di bank lain, apabila nasabah tersebut tidak ditemukan memiliki pinjaman dan masuk ke dalam syarat maka pihak bank akan melakukan survey, hasil survey analisa akan diserahkan dan ditunjukkan kepada *Supervisor Bisnis* dan Pimpinan, jika diacc maka kredit akan dicairkan.

2. Apa sajakah syarat-syarat untuk mendapatkan KUR yang ada di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Persyaratan mendapatkan KUR adalah nasabah mengajukan permohonan KUR, memiliki usaha, melengkapi data-data seperti: foto copy E-KTP suami dan istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, pas photo suami dan istri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, surat keterangan usaha dari kelurahan, surat keterangan harga tanah dan bangunan (agunan), foto copy pajak bumi dan bangunan (PBB) agunan, foto copy agunan, dan NPWP (bagi yang belum memiliki tabungan Bank Lampung).

3. Apakah pihak BPD hanya memberikan modal saja/atau ikut serta mengelola dan memantau usaha tersebut?

Jawaban :

Pihak BPD memberi modal kepada nasabah, namun tidak ikut serta dalam mengelola usaha yang dijalankan oleh nasabah. Disini pihak bank hanya memberi saran dan masukan saja.

4. Bagaimanakah sistem pemantauan usaha di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Pamantauan atau monitoring ini biasanya dilakukan setelah kredit dicairkan oleh bank, pihak bank akan melihat benar atau tidak kredit tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi. Dan setiap bulannya atau dua bulan sekali pihak bank akan mendatangi langsung usaha nasabah untuk melihat perkembangannya.

5. Bagaimana sistem pembayaran kredit yang ada di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Pembayaran tergantung musiman atau bulanan, dimana jika musiman dibayar saat waktu jatuh tempo ditambah dengan bunga, dan jika bulanan dibayar dengan sistem angsuran perbulan ditambah bunga.

6. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Faktor pendukung program KUR di BPD Lampung KC Bandar Jaya adalah bunga yang ditetapkan rendah dan tidak ada biaya profesi administrasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga menyulitkan bank menganalisa pendapatan debitur, agunan yang diberikan oleh nasabah terkadang tidak sesuai, nasabah yang mengajukan kredit ternyata masih memiliki pinjaman di bank lain dan nasabah yang bersangkutan tidak bisa melunasinya,

Bandar Jaya, Mei 2019
Account Officer BPD Lampung KC
Bandar Jaya



Amalia Yasmine

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUPERVISOR BISNIS BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Pertama kali didirikan di Bandar Lampung dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. DES.57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat di hadapan Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-8261.HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

2. Apakah visi dan misi BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

VISI

Menjadi Bank Regional Terkemuka dan Terpercaya di Lampung

MISI

- Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan jasa Perbankan
- Memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional
- Mempunyai daya saing tinggi
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi
- Memiliki struktur permodalan yang kuat
- Pengembangan Infrastruktur Informasi Teknologi
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan Corporate Image di masyarakat serta meningkatkan kualitas pengendalian intern
- Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

3. Bagaimana struktur organisasi BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Untuk struktur organisasi di BPD Lampung KC Bandar Jaya bisa melihat datanya di bagian umum.

4. Apa saja produk-produk kredit UMKM yang di tawarkan di BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

Produk kredit UMKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya ada Kredit Aneka Usaha yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha perorangan maupun kelompok untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik investasi maupun kebutuhan modal kerja dengan bunga 14% pertahun dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perbankan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, dimana bunga yang ditetapkan adalah 7% pertahun.

5. Berapa plafon KUR yang ditetapkan BPD Lampung KC Bandar Jaya?

Jawaban :

KUR Mikro dengan plafon 1 juta hingga Rp 25 juta dengan jangka waktu KUR mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja, paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, KUR Kecil dengan plafon dari 25 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu KUR kecil paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

6. Berapa jumlah dana yang dikeluarkan oleh BPD Lampung KC Bandar Jaya untuk penyaluran KUR pada tahun 2018?

Jawaban :

Jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh bank pada tahun 2018 untuk Kredit Usaha Rakyat sejumlah 5.083 milyar dan disalurkan kepada 64 debitur. Dimana dana untuk KUR Kecil 1.1 miliar disalurkan kepada 3 debitur, dan untuk KUR Mikro sebesar 3.983 Miliar disalurkan kepada 61 debitur

Bandar Jaya, Mei 2019
Supervisor Bisnis BPD Lampung KC
Bandar Jaya



M. Budi Mulyawan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0861/In.28/D.1/TL.00/04/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Pimpinan BPD Lampung KC.
 Bandar Jaya
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0860/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 16 April 2019 atas nama saudara:

Nama : **OKTA SEPTIANA WATI**
 NPM : 1502100289
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPD Lampung KC. Bandar Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC. BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 16 April 2019
 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 001



**BANK LAMPUNG
KANTOR CABANG BANDAR JAYA**

Bandar Jaya, 13 Mei 2019

Nomor : B.337/KC-BDJ/05/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Research

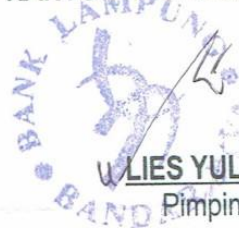
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IAIN Metro

Menindaklanjuti surat dari IAIN Metro Nomor : 0086/ln.28./D.1/TL.00/04/2019 Tanggal 16 April 2019 Perihal Permohonan Izin Research, setelah kami pelajari dan pertimbangkan, bersama ini kami menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kami menyetujui pelaksanaan Research.
- Dengan persyaratan adanya MOU/ kerjasama antara pihak IAIN Metro dengan pihak Bank Lampung Cabang Bandar Jaya.
- Jumlah mahasiswa pra survey yang diizinkan dalam penelitian 1 (satu) orang yaitu program keahlian :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan SI Perbankan Syariah : 1 (satu) mahasiswi A.n Okta Septiana Wati

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG BANDAR JAYA**



LIES YULIANTY
Pimpinan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0860/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **OKTA SEPTIANA WATI**
 NPM : 1502100289
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPD Lampung KC. Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC. BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 16 April 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Yadi Purnomo
 SPV. SDM & Unum



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-308/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : OKTA SEPTIANA WATI
NPM : 1502100289
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100289.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Mei 2019
Kepala Perpustakaan


Dis. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195803311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

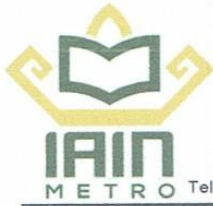
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 26 Maret 2019		<ul style="list-style-type: none">⊙ Gali pingamanKur di paparin⊙ Matam" kurSampai diHorinulaga⊙ Gali kur Menengah.⊙ TleankunDlefon kur ⊙ Gunakan teknikSampling purposip	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

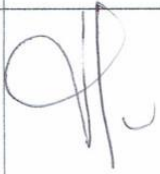


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jum'at 29 Maret 2019		Acc Pendalaman Bab I - III	

Dosen Pembimbing II,

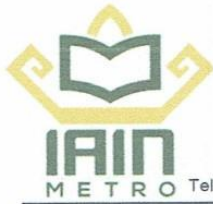


Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Senin 1 April 2019		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan c. peranan kur Terhadap Pemberdayaan UMKM• Dalam A.P.D wawancara dengan narabah tanyakan omsetnya ?	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Jum'at 5 April 2019		Acc Outline	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Jum'at 5 April 2019		Acc APO	

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
0.	Selasa 19 Mei 2019		- BAB IV → Peranan KUR tidak terjabarkan dengan jelas. Dalam Indikator Peranan KUR itu bisa dijelaskan : - perkembangan usaha / meningkat atau tidaknya dari omzet. - Bagaimana usaha itu sebelum dan sesudah adanya KUR → Dijelaskan bagaimana praktek pinjaman.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Jum'at 17 Mei 2019		ACC bbt-U	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 05/04/ 2019	✓	✓ Revisi Daftar Isi. ✓ Revisi cara penulisan foot note/cutatan Kaki. ✓ Revisi out Line. ✓ Revisi judul Pengantar Dntz.	   

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

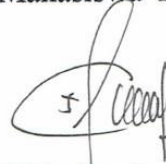
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jumat 12 April 2019	✓	Ace Pemb I-III Skripsi ini. Sinyalyn segala sangat untuk turut ke lapangan pendidikan	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

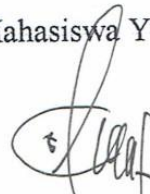
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Kamis 18/04/ 2019.	✓	Ace Out Line, lanjutan untuk tulis ke laporan	
		✓	Ace APD Lanjutan.	

Dosen Pembimbing I,

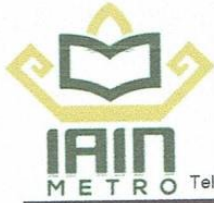


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

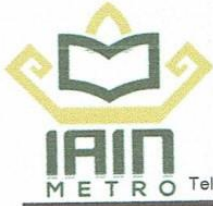
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Selasa 21 Mei 2015	✓	Revisi paragraf kata-kata yg salah.	
		✓	Buat tabel per- bandingan antara sebelum dan setelah di beri KUR.	
5.	Rabu 22/05/ 2015	✓	Ace Bab IV	
		✓	Lengkapi skripsi ini dg dokumen lainnya.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Okta Septiana Wati Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100289 Semester/Skripsi : 8 / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Kamis 23/05/ 2019.	✓	Ace untuk di Munago was ken	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

OUTLINE

PERANAN KUR TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI KASUS BPD LAMPUNG KC BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kredit Usaha Rakyat
 - 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat
 - 2. Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat
 - 3. Persyaratan untuk Mengajukan Kredit Usaha Rakyat
 - 4. Penilaian Kredit
- B. Pemberdayaan UMKM
 - 1. Pengertian Pemberdayaan UMKM
 - 2. Prinsip Pemberdayaan UMKM
 - 3. Dampak Program Pemberdayaan UMKM
 - 4. Faktor Kendala dan Potensi Efektifitas Program Pemberdayaan
- C. Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - 1. Sejarah Berdirinya BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - 2. Visi dan Misi BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - 3. Struktur Organisasi BPD Lampung KC Bandar Jaya
 - 4. Produk-produk BPD Lampung KC Bandar Jaya
- B. Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM Pada BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.



Okta Septiana Wati
NPM. 1502100289

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI MUNAQASYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 Mei 2019
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Kampus II Gedung Abu Yusuf (E6.II.4)

MAHASISWA

Nama : Okta Septiana Wati
NPM : 1502100289
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Tempat : Kampus II Gedung Abu Yusuf (E6.II.4)
Judul : Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A
Penguji 1 : Drs. Dri Santoso, M.H
Penguji 2 : Rina El Maza, SHI., MSI
Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I

Penguji I:

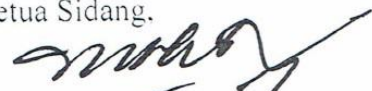
1. Harus jelas teori yg ada di LBM.
2. Harus ada teori yg menjelaskan kur itu dari pemerintah, atau ada surat edaran dari menteri kea. ttg kur.
3. Harus jelas sejarah dari UMK-KUR dan misi positif dari adanya kur apa? ex. pengurangan arti, mempercepat pekeho.
4. dan di LBM harus jelas bank apa saja yg di fungsi ut menyediakan kur apakah BPD termasuk? dan apa-nya apa??
5. Pemberdayaan (perannya) yg mau diteliti saat di ben apa setelah di kait?
6. Jelaskan subisi & bunga itu dari mana?
7. indikator dari UMKM itu apa saja? dan modal berapa? dan?
8. Harus jelas jenis usaha dari nasabah UMKM yg di wawancara itu apa saja?
9. Harus bisa bedakan kecil? menengah? dan besar itu berapa modal & pelayanannya.
10. Teori di perbaiki.

Pengujian II

1. Di halaman laporan diperbaiki yg ada termauk di dle skripsi yg dicaruk ke-
 2. Daftar riwayat hidup yg dicaruk ke di la-puran
 3. Harus jelas aturan yg dipakai of BPD.
 4. Harus jelas alur dari KUR itu apa saja?
 5. Harus ada aturan penyediaan KUR itu siapa saja?
Sehingga BPD bisa masuk!!! (siapa yg bisa penyediaan KUR?)
 6. Perhatikan peran itu dari mana standarnya? dan bisa
di deskripsikan!!! → dan harus ada peran yg ideal dari
KUR itu apa?? (harus ada alat ukurnya!!!)
 7. tolong juga bisa pakai KUR kalau pakai Program
lingit..
 8. harus ada kriteria tersendiri bagi KUR kecil & mikro
di teorinya!!!
 9. SC & FP → seharusnya dipakai di awal pemberian KUR
 10. teori ttg UMKM yg dari hasil penelitian yg dipakai
lagi!! di hal. 28.
 11. ~~hal~~ hitungan yg terlalu banyak lbid → kelihatan
keura-uran referensinya.
 12. jurnal yg dipakai itu di ambil teorinya bukan yg di la-
purnanya.
 13. landasan teorinya ditata ulang lagi!!!
- Kata : Harus secepatnya Gerak kegunaannya!!

Metro, 28 Mei 2019

Ketua Sidang.



Drs. H. M. Saleh, M.A

FOTO PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP



Okta Septiana Wati dilahirkan di Purworejo, kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 07 Oktober 1997. Peneliti merupakan putri kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bpk. Sutrisno dan Ibu Nyoman Rawi. Bertempat tinggal di Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan TK di Raudlatul Athfal / Taman Kanak-Kanak Islam Darul Falah yang beralamatkan di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah pada tahun 2003, lalu melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kotagajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kotagajah di Kecamatan Kota Gajah dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah di SMA Negeri 1 Punggur dan tamat pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, yang pada tahun 2017 telah beralih status dan sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan S1-Perbankan Syariah (S1-PBS). Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah”**